

**ANALISIS KETERLAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM SISTEM
KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB) DI SMAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 10 TAHUN 2013
PADA KECAMATAN BAJENG, PATTALASSANG DAN
BONTOMARANNU**



***Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) Jurusan Pendidikan Fisika pada Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Alauddin Makassar***

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

FEBRYANTO YUGUSTIADI PUTRA
NIM: 20600114090

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febryanto Yugustiadi Putra
NIM : 20600114090
Tempat, Tgl. Lahir : Sengkang, 06 Februari 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Fisika
Fakultas/Program : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Sudiang, Asri Lama Blok D7/3
Judul : “Analisis Keterlaksanaan Kebijakan Program Sistem Kelas
Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMAN Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013
pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Samata, 2018

Penyusun,

Febryanto Yugustiadi Putra
20600114090

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Keterlaksanaan Kebijakan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu” yang disusun oleh Saudara Febryanto Yugustiadi Putra, NIM: 206001114090, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan (S.Pd.)** Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Fisika dengan beberapa perbaikan.

Samata,

16 Agustus 2018 M
4 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

(SK. Dekan No. 2330 Tahun 2018)

Ketua	: Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Rafiqah, S.Si., M.Pd.	(.....)
Munaqisy I	: Drs Ibrahim Nasbi, M.Th.I.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. La Ode Ismail Ahmad, M.Th.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamka, M.Th.I.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Ferawati Jafar, S. Si., M. Pd.	(.....)

Diketahui Oleh:

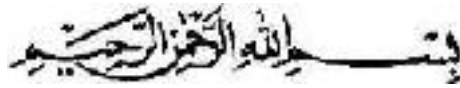


Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar

Dr. H. Muhammad Amri, Lc. M. Ag

19730120 200312 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan ke hadirat Allah swt yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Keterlaksanaan Kebijakan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu”.

Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan ke hadirat junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullulah saw, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Alm. M.

Yunus dan Ibunda drg. Gusna Rosnijatih atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan hingga dapat menyelesaikan studiku dan selalu memberikanku motivasi dan dorongan baik moril dan materil.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.
2. Dr. H. Muhammad Amri, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
3. Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si. M.Si. dan Rafiqah, S.Si. M.Si. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hamka, M.Th.I. dan Andi Ferawati Jafar S.Si., M.Pd. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ucapan terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si. dan Drs. M. Yusuf Hidayat, M.Pd. yang telah meluangkan waktunya untuk memvalidasi instrumen penelitian saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada teman-teman mahasiswa jurusan pendidikan fisika UIN Alauddin Makassar angkatan 2014 tanpa terkecuali terima kasih atas kebersamaannya menjalani hari-hari perkuliahan, semoga menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt, penulis memohon rida dan magfirah-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah swt, semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca, Aamiin.

Wassalam.



Samata,

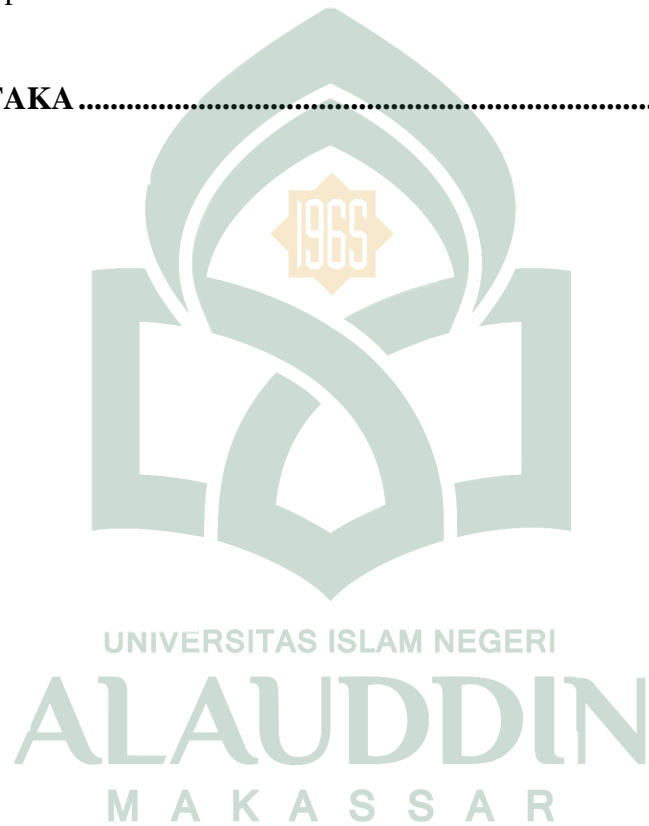
2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1-7
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional Variabel.....	7
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	 8-23
A. Tinjauan Kebijakan Pendidikan.....	8
B. Tinjauan SKTB	17
 BAB III METODE PENELITIAN	 24-43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	24
B. Pendekatan.....	24
C. Populasi dan Sampel.....	25
D. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen	27
E. Teknik Analisis.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44-56
A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan	54
 BAB V PENUTUP	 57-58
A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi	58
 DAFTAR PUSTAKA	 59



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Populasi	25
Tabel 3.2 Sampel Penelitian.....	27
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Angket Penelitian	31
Tabel 4.1 Nama-Nama Validator	44
Tabel 4.2 Hasil Validasi Instrumen Angket.....	45
Tabel 4.3 Skor Respon Guru untuk SMAN 2 Gowa Kec. Bajeng	46
Tabel 4.4 Skor Respon Guru untuk SMAN 21 Gowa Kec. Pattalassang	48
Tabel 4.5 Skor Respon Guru untuk SMAN 8 Gowa Kec. Bontomarannu	49
Tabel 4.6 Skor Respon Guru Secara Keseluruhan	51
Tabel 4.7 Skor Hasil Observasi.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Grafik Respon Guru Untuk SMAN 2 Gowa Kec.Bajeng	47
Gambar 4.2 Grafik Respon Guru Untuk SMAN 21 Gowa Kec.Pattalassang	49
Gambar 4.3 Grafik Respon Guru Untuk SMAN 8 Gowa Kec.Bontomarannu ...	50
Gambar 4.4 Grafik Respon Guru Secara Keseluruhan	52
Gambar 4.5 Grafik Skor Hasil Observasi	54



ABSTRAK

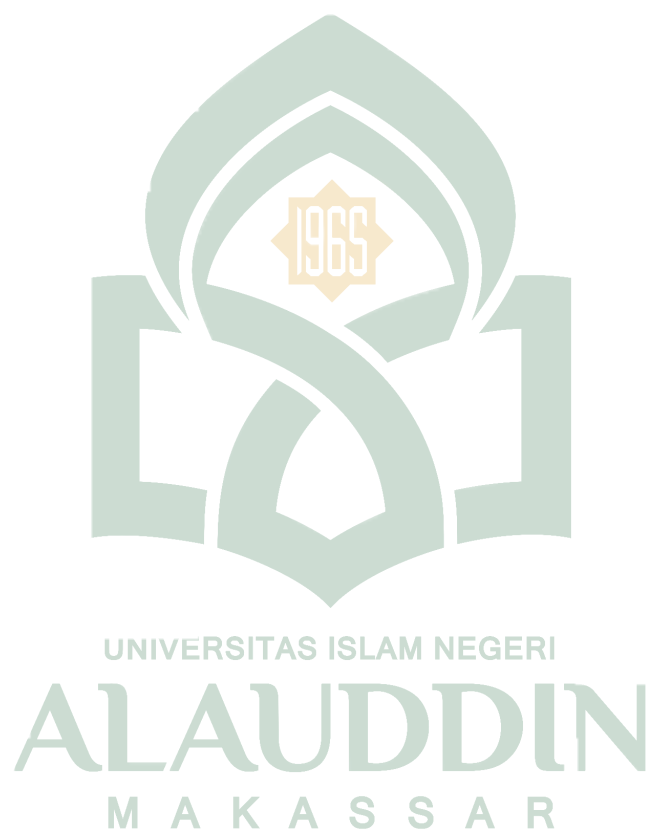
Nama : FebryantoYugustiadi Putra
NIM : 20600114090
Judul : "Analisis Keterlaksanaan Kebijakan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 Pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keterlaksanaan kebijakan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran keterlaksanaan kebijakan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMAN di Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu yang berjumlah 120 orang. Metode penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Proportionate Stratified Random Sampling* dan ukuran sampelnya ditentukan dengan menggunakan teknik Slovin dimana diperoleh sampel sebanyak 92 orang dengan rincian 39 di Kecamatan Bajeng, 18 di Kecamatan Pattalassang dan 35 di Kecamatan Bontomarannu. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu instrument berupa angket/kuisisioner yang diisi oleh informan yang terkait keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013. Selain itu dilakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi sebagai panduan yang dijadikan pendukung hasil respon angket/kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data statistik deskriptif secara kuantitatif dan kategorisas yang digunakan yaitu kategorisasi menurut Saifuddin Azwar yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu baik, cukup dan kurang.

Analisis data respon guru terhadap keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 secara umum berada pada ketegori Baik. Dan hasil observasi yang dilakukan terkait keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 menunjukan pada Kecamatan Bajeng memiliki skor yang berada dalam

kategori baik, sedangkan pada Kecamatan Pattalassang memiliki skor yang berada dalam kategori kurang, dan pada Kecamatan Bontomarannu memiliki skor yang berada dalam kategori cukup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa:

1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai –nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.²

¹ Hamid Darmadi, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 1.

² Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 31

Sementara itu Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, sedangkan kualitas sumber daya manusia itu tergantung pada kualitas pendidikannya. Pendidikan merupakan usaha manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya, antara lain melalui proses pembelajaran di sekolah. Sekolah berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas pula.

Maka sangat pentinglah sebuah inovasi kebijakan pendidikan dalam suatu daerah menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi ini. Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo (2005-2015) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengeluarkan kebijakan System Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). SKTB disosialisasikan pada tahun 2011 dimana pelaksanaannya pada tahun 2012 dan pada 2013 dilaksanakan secara keseluruhan disemua tingkatan sekolah SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Sebagai langkah awal, SKTB dijalankan di beberapa sekolah percontohan tepatnya 50 sekolah untuk tingkatan SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk

³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2002, tentang Sistem Pendidikan Nasional

memajukan kualitas pendidikan dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kini dibawah kepemimpinan Adnan Purictha Ichsan Yasin Limpo pelaksanaannya telah merata disetiap tingkatan pendidikan dasar, mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK di Kabupaten Gowa.

SKTB adalah Sebuah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang menekankan pada pelayanan pendidikan secara komprehensif dan tuntas anak didik, menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam belajar, memberikan pengalaman belajar yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, khusus anak didik dikabupaten Gowa. Kebijakan tersebut ditempuh karena pemerintah daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan menyadari bahwa system pendidikan, terutama pendidikan dasar adalah pondasi dari semua jenjang pendidikan yang ada, yang tersebar dari kota hingga pelosokdesa terpencil seharusnya memiliki kekuatan dalam mengembangkan berbagai aspek kemampuan diri peserta didik untuk hidup sebagian anggota masyarakat yang produktif. Juga disadari bahwa pendidikan dasar merupakan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya dan mengembangkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya.

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah kebijakan program pendidikan pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui

strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan.⁴

SKTB ini menggunakan Sistem Promosi Otomatis (*System Outomatic Promotion*) yang merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas bagi para peserta didik yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia. Pada kebijakan tersebut peserta didik tidak diperkenankan untuk tidak tinggal kelas meskipun peserta didik yang bersangkutan tidak menyelesaikan ataupun menuntaskan kompetensi sesuai alokasi yang tersedia, namun akan diberikan remedial ataupun klinik dini yaitu pemberian bantuan pembelajaran secara berkesinambungan dengan tujuan memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang dirapkan.

Ketuntasan yang dimaksud pada Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) adalah menyelesaikan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran sebagaimana yang dinyatakan dalam indicator pada setiap semester. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar peserta didik berhak mengikuti pelajaran atau mengambil kompetensi dasar tertentu pada kelas berikutnya walaupun terdapat kompetensi dasar yang belum ditutaskan atau belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal.

SKTB berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang hendak dicapai dengan SKTB adalah memberikan pelayanan

⁴ Perda Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013, Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

pendidikan secara maksimal pada anak didik, agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dan membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh. Keunggulan sistem SKTB sendiri yaitu peserta didik belajar selalu dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas karena nasib mereka tidak ditentukan oleh Ujian Nasional dan tes yang mengukur kemampuan sesaat dan setiap peserta didik terjamin mendapatkan haknya memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, selain itu peserta didik dapat lebih cepat menyelesaikan sistem kredit semester sehingga biaya yang dikeluarkan orangtua untuk keperluan pribadi dapat hemat.

Dampak dengan adanya penerapan SKTB dalam hal program tidak mengenal tinggal kelas bagi siswa dapat menyebabkan adanya beberapa siswa yang merasa diuntungkan dengan kebijakan ini dan membuat mereka kurang serius dan santai dalam pembelajaran tanpa memikirkan kualitas pembelajaran yang ada pada dirinya, selain itu dengan adanya kebijakan ini seperti adanya penekanan siswa harus tuntas walaupun ada diantara mereka belum mampu, disinilah dituntut peran guru yang harus bekerja keras dalam pelaksanaan SKTB ini bukan hanya melakukan peningkatan kelulusan tapi peningkatan kualitas. Hal tersebut dapat menyebabkan kualitas pendidikan semakin menurun, minat belajar siswa menjadi menurun apalagi siswa yang pada dasarnya sudah malas, keinginan untuk rajin ke sekolah juga

berpengaruh karena sudah ada tertanam dalam pemikiran mereka adanya jaminan naik kelas, selain itu kualitas dan kreatifitas para guru juga berbeda-beda sehingga mempengaruhi dalam pencapaian keberhasilan SKTB.

Dalam penerapannya ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan SKTB yang belum terlaksana dengan baik yaitu berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Melanie Mulya S, *Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pelaksanaan SKTB di SD Inpres Cambaya)*⁵

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Keterlaksanaan Kebijakan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 Pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran keterlaksanaan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMAN berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran keterlaksanaan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMAN berdasarkan Peraturan Daerah

⁵Mulya S, Mulyani.2015. “Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa Studi Kasus Pelaksanaan SKTB di SD Inpres Cambaya”.Makassar:Universitas Hasanuddin.

Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran keterlaksanaan program system kelas tuntas berkelanjutan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Gowa.
2. Sebagai bahan rujukan dan bahan informasi bagi pengembangan peneliti selanjutnya.

E. Defenisi Operasional Variabel

Gambaran keterlaksanaan program SKTB adalah nilai atau skor yang diperoleh melalui angket/kuesioner dan lembar wawancara terstruktur dengan indikator-indikator yang diukur sebagai berikut: (a) SKTB Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) SKTB berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, (c) Model pembelajaran, (d) Model manajemen sekolah, (e) Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, (f) Hak dan Kewajiban peserta didik, (g) Deteksi Dini, (h) Satuan Kredit Semester (SKS). Indikator-indikator ini diukur dengan menggunakan angket dengan skala Likert.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Kebijakan*

1. **Pengertian Kebijakan**

Pertama-tama kita perlu memahami konsep “Kebijakan” yang sering digunakan secara luas. Menurut Kamus Oxford, kebijakan berarti “rencana kegiatan” atau pernyataan tujuan-tujuan ideal. Namun, dalam kehidupan sehari-hari kata kebijakan merupakan janji yang dibuat oleh kita sendiri, seperti kalimat “kita tidak akan meminjamkan uang kepada siapapun”. Arti itu bukan yang kita maksudkan disini. Kita membahas kebijakan bukan dalam arti pribadi, tetapi dalam arti organisasi. Kebijakan disini terkait dengan kebijakan publik dan dibuat atas nama Negara (state) yang dibuat oleh instrument/alat-alat negara untuk mengatur perilaku tiap orang, seperti guru atau siswa dan organisasi, seperti sekolah dan universitas. Fokus perhatiannya pada kegiatan Negara bukan pada kegiatan perusahaan swasta yang sering hanya untuk kepentingannya sendiri.¹

Kebijakan adalah terjemahan dari kata “wisdom” yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin

¹ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*(Bandung: Remaja Rosdakarya,2012), h. 131-132.

memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat pengecualian.² Artinya wisdom atau kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada masyarakatnya. Pimpinan yang arif sebagai pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja mengecualikan aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain dapat dikecualikan tetapi tidak melanggar aturan.³

Campbell mengemukakan kebijakan adalah batasan keputusan memandu masa depan. Implikasi kebijakan menurut Mann mempersyaratkan dua hal. Pertama, Sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan kebijaksanaan selalu ditemukan problem. Adapun karakteristik problem tersebut pada dasarnya bersifat publik, sangat konsekuensial, sangat kompleks, didominasi ketidakpastian, dan mencerminkan ketidaksepakatan tentang tujuan yang dicapainya.⁴

Rich mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikann pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif di antara sistem. Dengan demikian dari berbagai

² Imron,

³ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.97.

⁴ *Ibid*

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan atas suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena suatu alasan yang kuat.⁵

Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Bupati/Walikota sebagai pimpinan dalam pemerintahan mengatur sistem pelayanan pada satuan pendidikan. Pemerintah tersebut mengambil kebijakan mengenai penentuan anggaran pendidikan, ketenagaan, standarisasi kurikulum, standarisasi kelembagaan suatu pendidikan, kalender akademik, dan sebagainya. Kepala sekolah sebagai pimpinan pada tingkat satuan pendidikan mengatur sistem operasi sekolah secara internal mengambil kebijakan mengenai pendidikan dan pengajaran, manajemen sekolah, kesiswaan, dan sebagainya.⁶

2. Pendekatan Kebijakan Dalam Pendidikan

a. Pendekatan Empirik

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan bersifat factual atau fakta dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Oleh karena itu analisa kebijakan pendidikan secara empiris diharapkan dapat menghasilkan dan memindahkan informasi-

⁵ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.97-98

⁶ *Ibid*, 98

informasi penting mengenai nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan-tindakan pendidikan. Karena itu pengetahuan mengenai apakah (fakta), mana yang benar (nilai), dan apa yang harus dilakukan (tindakan) memerlukan penggunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi masalah alternatif, tindakan, hasil, dan hasil-guan kebijakan. Analisis pendekatan kebijakan empiris ini telah dilakukan melalui penelitian oleh para ahli berasal dari permulaan abad ke 19 dari karya para demograf, statistisi, dan penelitian survei.⁷

Penelitian kebijakan publik bersifat empiris dan kuantitatif pada suatu organisasi dilakukan seperti masalah-masalah kemiskinan, pemberantasan buta huruf, gelandangan di kota, penyakit masyarakat, dan control politik berlawanan dengan tradisi yang lebih tua seperti spekulasi filosofis, mistik, takhayul, dan otoritas agama terutama (tidak sepenuhnya) mengandalkan observasi yang didasarkan pada pengalaman indrawi (spekulatif) untuk membenarkan pernyataan dan pengetahuan. Kebijaksanaan merupakan proses rasional dimana analisis menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal mengenai pemecahan-pemecahan potensial atas masalah kebijaksanaan.⁸

Dengan demikian informasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pendekatan empiris akan menghasilkan informasi penyelenggaraan pembelajaran yang aktual yang dibutuhkan dilapangan

⁷ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.100.

⁸ *Ibid*

pada akhirnya dapat mengarah kepernyataan kebijakan yang biasa saja sama sekali berbeda dengan kondisi objektif di lapangan. Karena hal ini akan sangat tergantung pada asumsi para pengambil kebijakan yang terkandung dalam suatu argumen kebijakan yang ditetapkan bagi suatu organisasi atas dasar hasil analisis yang telah dilakukan. Argumen kebijakan pendidikan itu antara lain mengapa kurikulum harus direvisi, mengapa sistem evaluasi hasil belajar diubah, mengapa kalender akademik diubah dari caturwulan menjadi semester, mengapa anggaran pendidikan tidak sesuai kebutuhan pembelajaran, dan sebagainya.⁹

b. Pendekatan Evaluatif

Evaluatif menurut Imron (1996:86) adalah suatu aktifitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan ataukah tidak, berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak.¹⁰ Jones (mengartikan evaluasi kebijakan organisasi adalah suatu kegiatan yang didesain untuk menilai hasil-hasil program yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran, dan metode analisisnya.¹¹ Pendekatan evaluatif menurut Suryadi dan Talaar dimaksudkan untuk menerangkan keadaan dengan menerapkan suatu kriteria atas terjadinya gejala tersebut yaitu gejala yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah dihubungkan

⁹ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.100-101.

¹⁰ Imron, h. 86.

¹¹ Jones, 1977

sebelumnya.¹² Jadi, evaluasi kebijakan bukan sekedar mengumpulkan fakta tentang sesuatu katakanlah mengenai manajemen pendidikan yang dapat menjamin mutu, tetapi menunjukkan bahwa sesuatu itu mempunyai nilai jika dibandingkan dengan kriteria atau acuan yang menjadi pedoman.¹³

Sejalan dengan berbagai pendapat tersebut Anderson mempertegas bahwa evaluasi kebijakan terdiri dari: (1) evaluasi impresionistik yaitu apakah kebijakan memenuhi kepentingan diri, ideologi, atau criteria penilaian lain yang didasarkan pada fakta fragmentaris atau anekdot; (2) evaluasi operasional yaitu bagaimana masalah pelaksanaan kebijakan apakah dijalankan dengan jujur, berapa besar biayanya, apakah tidak ada duplikasi dengan program lain, apakah aspek hukum dipenuhi, dan siapakah yang diuntungkan; dan (3) evaluasi sistemik yaitu mengacu pada masalah pokoknya seperti dampak dan efektifitas program: apakah kebijakan itu mencapai tujuannya, apakah untung ruginya, siapakah yang memperoleh keuntungan, dan apa yang akan terjadi jika kebijakan itu tidak ada.¹⁴

Oleh karena itu, penekanan pendekatan evaluatif ini terutama pada penentuan bobot atau manfaatnya (nilai) beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat evalatif. Evaluasi terhadap kebijakan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dan menurut nilai yang mana kebijakan itu ditentukan. Dengan

¹² Suryadi dan Talaar, 1993, h.46.

¹³ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.101.

¹⁴ *Ibid.*

demikian akan ditegaskan bahwa evaluasi kebijakan organisasi adalah suatu aktifitas untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan benar-benar dapat diterapkan dan dilaksanakan serta seberapa besar dapat memberikan dampak nyata memenuhi harapan terhadap khalayak sesuai direncanakan.¹⁵

3. Model-Model Kebijakan dalam Pendidikan

a. Model Deskriptif

Model deskriptif menurut Suryadi dan Talaar adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan baik murni maupun terapan untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Sedangkan menurut Chon model deskriptif adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan sesuatu “*state of the art*” atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu diketahui para pemakai. Jadi model deskripsi ini dapat menerangkan apakah fasilitas pembelajaran sudah memadai, kualifikasi pendidikan guru memenuhi persyaratan, anggaran untuk pembelajaran, dan sebagainya.¹⁷ Tujuan model deskriptif oleh Dunn (1981:111) memprediksikan atau menjelaskan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif

102. ¹⁵ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.101-

¹⁶ Suryadi dan Talaar, 1993, h.46.

¹⁷ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, h.105.

digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan seperti indikator angka partisipasi murni dan angka *drop out* yang dipublikasikan.¹⁸

b. Model Normatif

Diantara beberapa jenis model normatif yang digunakan analisis kebijakan adalah model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum (model antri), pengaturan volume dan waktu yang optimum (model inventaris) dan keuntungan yang optimum pada investasi publik (model biaya manfaat). Karenanya masalah-masalah keputusan normatif adalah mencari nilai-nilai variabel terkontrol (kebijakan) akan menghasilkan manfaat terbesar (nilai), sebagaimana terukur dalam variabel keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan.¹⁹ Pendekatan normatif menurut Suryadi dan Tilaar disebut juga pendekatan preskriptif yang merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, akidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai untuk memecahkan suatu masalah.²⁰

c. Model Verbal

Model verbal (verbals models) dalam kebijakan didekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukannya bahasa logika simbolis dan matematika sebagai masalah substantif. Dalam menggunakan model verbal, analisis bersandar pada nilai nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan

¹⁸ Dunn, 1981, h.111.

¹⁹ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*(Bandung: Alfabeta, 2013), h.105.

²⁰ Suryadi dan Talaar, 1993, h.47.

rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukan berbentuk nilai-nilai angka pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan diantara para ahli dan orang awam, dan biayanya murah. Keterbatasan model verbal adalah masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat *Implicit* atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan, karena tidak didukung informasi atau fakta yang mendasarinya.²¹

d. Model Simbolis

Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya menciri suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal dari suatu masalah kebijakan diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam dan menggunakan metode-metode matematika, statistika, dan logika. Memang model ini sulit untuk dikomunikasikan diantara orang awam, termaksud para pembuat kebijakan, dan bahkan diantara para ahli pembuat model sering terjadi kesalah pahaman tentang elemen-elemen dasar dari model tersebut. Kelemahan praktis model simbolis adalah hasilnya tidak mudah diinterpretasikan, bahkan diantara spesialis, karena asumsi-asumsinya tidak dinyatakan secara memadai.²²

²¹ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*(Bandung: Alfabeta, 2013), h.106.

²² *Ibid*

e. Model Prosedural

Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin, sebagai contoh: Pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, angkatan kerja terdidik, penuntasan wajib belajar 9 tahun, alokasi anggaran pemerintah untuk pembelajaran, dan suplai makanan dalam tahun-tahun mendatang yang tidak dapat diterangkan secara baik, karena data-data dan informasi yang diperlukan tidak tersedia. Prosedur simulasi dan penelitian pada umumnya (meskipun tidak harus) diperoleh dengan bantuan komputer, yang diprogramkan untuk menghasilkan prediksi-prediksi alternatif dibawah serangkaian asumsi yang berbeda-beda.²³

f. Model Sebagai Pengganti dan Perspektif

Pendekatan perspektif menurut Suryadi dan Tilaar merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memecahkan suatu masalah khususnya masalah kebijakan.²⁴ Preskripsi atau rekomendasi diidentikkan dengan advokasi kebijakan yang acapkali dipandang sebagai cara membuat keputusan ideologis atau untuk menghasilkan informasi kebijakan yang relevan dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai solusi-solusi yang

²³ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*(Bandung: Alfabeta, 2013), h.107.

²⁴ Suryadi dan Talaar, 1993, h.47.

memungkinkan bagi masalah publik. Jadi pengambilan kebijakan bukan atas kemauan atau kehendak para penentu kebijakan, tetapi memiliki alasan-alasan yang kuat dan kebijakan tersebut memang menjadi kebutuhan publik. Bentuk ekspresi dari model kebijakan lepas dari tujuan, dapat dipandang sebagai pengganti (*surrogetes*) atau sebagai perspektif (*perspectives*).²⁵

B. Tinjauan SKTB

1. Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa

SKTB adalah kebijakan program pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan dengan berdsar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

SKTB berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang hendak dicapai dengan SKTB adalah memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik, agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dan membantu memfasilitasi

²⁵ *Ibid*, 107-108

²⁶Perda Kabupaten Gowa No.10 Tahun 2013, tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

pengembangan potensi anak didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh.²⁷

Ruang lingkup Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan menurut (Perda Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013) meliputi:

a. Model Pembelajaran

Model pembelajaran SKTB menekankan pada proses pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreatifitas

b. Model Manajemen Sekolah

Model manajemen sekolah sistem SKTB meliputi rencana kerja sekolah(RKS), pengelolaan keuangan sekolah, kegiatan produksi dan jasa sekolah, pengelolaan kurikulum, supervisi akademik, pengelolaan peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, pembinaan tenaga administrasi sekolah, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan monitoring evaluasi.

Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) merupakan suatu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa, dalam pelaksanaannya pemerintah memiliki hak dan kewajiban meliputi.²⁸

²⁷*Ibid.*

²⁸Perda Kabupaten Gowa No.10 Tahun 2013, tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

- a. Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan SKTB.
- b. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya berhak dan berkewajiban mengatur, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pendidikan.
- c. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah wajib diketahui dan mendapat persetujuan.
- d. Dalam penyelenggaraan SKTB Pemerintah daerah membentuk dan/atau menunjuk suatu lembaga untuk peningkatan mutu pendidikan dan evaluasi mutu pendidikan
- e. Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk penyelenggaraan SKTB.

Disamping pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban, peserta didik juga memiliki hak dan kewajiban meliputi.²⁹

- a. Mendapatkan pelayanan pendidikan secara maksimal agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran disetiap satuan pendidikan.
- b. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar setiap siswa dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan

²⁹Perda Kabupaten Gowa No.10 Tahun 2013, tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

- c. Seluruh peserta didik berkewajiban mengikuti seluruh proses pembelajaran dan menjaga norma-norma pendidikan,

Kebijakan program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) memiliki beberapa komponen diantaranya.³⁰

- a. Deteksi Dini

Deteksi dini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru diawal pembelajaran setiap kali pertemuan dengan tujuan mendapatkan data dan informasi tentang minat, bakat, kompetensi dan kreatifitas setiap siswa terhadap setiap mata pelajaran.

- b. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan kredit semester merupakan sistem penyelenggaraan program pendidikan dimana peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan.

SKTB ini menggunakan Sistem Promosi Otomatis (*System Outomatic Promotion*) yang merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas bagi para peserta didik yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia. SKTB terdapat pula yang dinamakan pembelajaran remedial, pembelajaran remedial yang dimaksud adalah beberapa kompetensi yang belum dituntaskan dapat diulang tanpa harus mengulang semua kompetensi yang telah dituntaskan.

³⁰*Ibid*

Secara garis besar SKTB terbagi menjadi kelas tuntas berkelanjutan terbatas dan kelas tuntas berkelanjutan tidak terbatas.

a. SKTB Terbatas

Yaitu dilakukan dimana setiap standar kompetensi yang kemudian mempunyai beberapa kompetensi dasar, ketika guru telah mengajarkan kompetensi dasar 1 kemudian melakukan evaluasi dengan syarat tuntas yaitu Kriteria Tuntas Minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh sekolah dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan memperoleh peserta didik yang tuntas dan kelompok peserta didik yang tidak tuntas. Kelompok peserta didik yang tuntas kemudian diberikan pengayaan (*enrichment*) sambil menunggu kelompok lain menuntaskan pemebelajarannya. Bagi kelompok yang tidak tuntas diberikan pengulangan (*remedial*) setelah itu dilakukan evaluasi sampai semua kelompok yang tadinya tidak tuntas dapat menuntaskan kompetensi dasar tersebut. Setelah semuanya telah tuntas barulah dilanjutkan ke kompetensi selanjutnya.

b. SKTB Tidak Terbatas

SKTB tidak terbatas maksudnya adalah setelah peserta didik mempelajari suatu kompetensi kemudian dilakukan evaluasi. Ketika peserta didik telah melakukan evaluasi kemudian terdapat dua kelompok ada yang tuntas dan adayang tidak tuntas. Maka kelompok yang telah berhasil tuntas dapat segera melanjutkan ke kompetensi berikutnya tanpa harus menunggu kelompok belum tuntas, sedangkan kelompok yang

belum tuntas diberikan pengulangan (remedial) kemudian dilakukan evaluasi sampai mendapatkan ketuntasan, kemudian barulah dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya. Sehingga bagi kelompok peserta didik yang dapat tuntas dengan cepat tidak terhambat oleh kelompok yang belum tuntas.

Secara operasional pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah setiap peserta didik.³¹

- 1) Tuntas menyelesaikan kompetensi dasar sebagaimana dinyatakan dalam indikator.
- 2) Tuntas menyelesaikan suatu mata pelajaran sesuai persyaratan yang dinyatakan dalam Kriteria Tuntas Minimal (KKM).
- 3) Tuntas menyelesaikan mata pelajaran satu semester berdasarkan beban SKS.
- 4) Tuntas menyelesaikan pembelajaran seluruh mata pelajaran pada kelas yang diikuti.
- 5) Berkelanjutan mengikuti pelajaran pada kelas berikutnya walaupun ada mata pelajaran yang memenuhi KKM. Peserta didik tidak tinggal kelas dan mengulang seluruh mata pelajaran di kelas tersebut, tetapi menyelesaikan ketuntasan pada mata pelajaran yang belum memenuhi KKM pada waktu belajar dikels berikutnya.

³¹Ayatollah Hidayat dan Ulfa Tenri Batari, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Edukasi Mitra Grafika, Makassar, 2014, Hal.15

- 6) Berkelanjutan mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan di atasnya (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK) tanpa ada mata pelajaran di kelas terakhir yang tidak tuntas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang benar-benar hanya mendeskripsikan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat atau kondisinya. Setelah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.¹ Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas².

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN yang berada pada Kecamatan Bajeng, Pattassang dan Bontomarannu.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif survei. Survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial atau politik dari suatu kelompok atau suatu

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 3.

²Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42.

daerah³. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif survei akan digunakan untuk mengetahui gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB diSMAN berdasarkan PERDA Kabupaten Gowa nomor 10 tahun 2013 pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu dengan memperoleh data dari berbagai macam sumber sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMAN pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu yang berjumlah 120 orang.

Tabel 3.1

Jumlah Populasi

No.	Subjek	Jumlah
1.	Guru SMAN 2 Gowa	51 Orang
2.	Guru SMAN 21 Gowa	23 Orang
3.	Guru SMAN 8 Gowa	46 Orang
Jumlah		120 Orang

Pemilihan populasi penelitian ini untuk mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber sehingga data tentang gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB di SMAN berdasarkan PERDA Kabupaten Gowa

³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 65.

nomor 10 tahun 2013 pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu yang diperoleh dapat diakui kebenarannya.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek/subjek penelitian. Tegasnya sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴

Dalam penelitian ini, sampel dipilih dengan metode *Proportionate Stratified Random Sampling*. Menurut Sugiyono, teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.⁵

Pada penelitian ini, untuk menentukan ukuran sampel minimum dari suatu populasi digunakan teknik Slovin. Adapun perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

N = besar populasi

n = jumlah sampel minimum

d = tingkat kepercayaan yang digunakan⁶

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 124.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 120.

⁶ Siregar, *Statistik Pematerik untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 60-61)

Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{120}{1 + 120 (0,05^2)}$$

$$n = 92$$

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Subjek	Jumlah
1	Guru SMAN 2 Gowa	39 Orang
2	Guru SMAN 21 Gowa	18 Orang
3	Guru SMAN 8 Gowa	35 Orang
Jumlah		92 Orang

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mengumpulkan data⁷. Pengumpulan data dapat melalui kepustakaan (*library research*), yaitu membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Kemudian pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*). Dalam halnya pengumpulan data

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 300.

peneliti mengakhiri setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan atau tidak mendapat data baru.⁸

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan, data yang dikumpulkan haruslah data yang benar. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar, instrumen pengumpulan datanya pun harus baik.⁹

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka ditempuh beberapa langkah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Dalam tahap persiapan, penulis melakukan kajian pustaka yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini kemudian membuat proposal penelitian (*draft skripsi*) yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur penelitian seperti menemukan lokasi penelitian, mencantumkan metode penelitian dan teknik pengolahan data.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga mempermudah dalam pengumpulan data misalnya menentukan, menyusun dan menyiapkan instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu angket.

Pada umumnya instrumen penelitian dapat dipahami sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian. Suatu

⁸Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 115.

⁹Subana dkk, *Statistik Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 28.

penelitian apa pun jenisnya dan metode yang digunakan, instrumen harus digunakan untuk mendapatkan data.¹⁰

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen pengumpulan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan¹¹. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi karena peneliti ingin memperoleh informasi dengan melihat secara langsung berkaitan dengan topik penelitian. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah yang keterlaksanaan kebijakan program SKTB dilokasi penelitian berdasarkan PERDA Kabupaten Gowa nomor 10 tahun 2013.

b. Kuesioner/angket

Pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis dari yang umum mengarah pada khusus untuk diberikan pada responden/informan yang umumnya merupakan daftar pertanyaan lazimnya disebut kuesioner, dibuat dengan menyesuaikan responden ataupun dapat dibuat untuk umum dalam arti terbatas pula sesuai dengan pengambilan sampel. Kuesioner diajukan pada responden dalam bentuk

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 305.

¹¹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63.

tertulis disampaikan secara langsung ke alamat responden, kantor atau tempat lain¹². Kuesioner/angket digunakan untuk menggali data tentang keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013. Adapun isi angket terdiri dari 40 item pernyataan maupun pertanyaan yang merupakan deskriptor dari indikator-indikator keterlaksanaan berdasarkan PERDA Kabupaten Gowa nomor 10 tahun 2013.

Kusioner digunakan untuk mengukur operasional variabel yang akan diteliti dengan menggunakan pernyataan-pernyataan dengan pengskoran menggunakan tipe skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.¹³

Dalam pembuatan kuesioner peneliti akan menyusun rancangan penyusunan instrumen atau dikenal dengan istilah kisi-kisi. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukan kaitan antara variabel yang akan diteliti dengan sumber data darimana data akan diambil, metode yang digunakan dalam instrumen yang disusun¹⁴. Adapun instrumen kuesioner yang peneliti buat mengacu pada kisi-kisi sebagai berikut:

¹²P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 55.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 93.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 162

Tabel 3.3

Kisi-kisi Instrumen Angket Penelitian

No.	Indikator	Deskriptor
1	SKTB Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<p>1. Sekolah mengembangkan kompetensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2. Sekolah mengembangkan kompetensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.</p>
2	SKTB Berfungsi Mengembangkan Kemampuan dan Membentuk Watak Serta Peradaban Bangsa yang Bermartabat Dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan	1. Sekolah member kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai semua kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar serta

	Bangsa	<p>dirumuskan dalam nilai.</p> <p>2. Sekolah memberikan pelayanan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pembelajaran yang kondusif.</p>
3	Model Pembelajaran	<p>1. Sekolah menekankan pada proses pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar dalam kondisi psikologis yang positif.</p> <p>2. Sekolah menekankan pada proses pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar dengan rasa percaya diri.</p> <p>3. Sekolah menekankan pada proses pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar dengan jujur.</p> <p>4. Sekolah menekankan pada</p>

		<p>proses pembelajaran untuk membantu peserta didik mampu mengembangkan kreativitas</p>
4	Model Manajemen Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah memajemen rencana kerja sekolah (RKS). 2. Sekolah Mengelola Keuangan sekolah. 3. Sekolah melakukan kegiatan produksi dan jasa sekolah 4. Sekolah memajemen pengelolaan kurikulum 5. Sekolah memajemen supervise akademik 6. Sekolah memajemen pengelolaan peserta didik. 7. Sekolah memajemen sarana dan prasarana. 8. Sekolah membina tenaga administrasi. 9. Sekolah memajemen

		<p>pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>10. Sekolah manajemen teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.</p> <p>11. Sekolah memonitoring evaluasi.</p>
5	Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah	<p>1. Pemerintah daerah mengarahkan penyelenggaraan SKTB.</p> <p>2. Pemerintah daerah membimbing penyelenggaraan SKTB.</p> <p>3. Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan SKTB.</p> <p>4. Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan SKTB.</p> <p>5. Pemerintah daerah mengatur setiap penyelenggaraan SKTB.</p> <p>6. Pemerintah daerah</p>

		merencanakan setiap penyelenggaraan SKTB.
		7. Pemerintah daerah melaksanakan setiap penyelenggaraan SKTB.
		8. Pemerintah daerah mengevaluasi setiap penyelenggaraan SKTB.
		9. Bupati mengetahui dan menyetujui penyelenggaraan program SKTB.
		10. Pemerintah daerah membentuk atau menunjuk suatu lembaga untuk meningkatkan mutu Pendidikan dalam penyelenggaraan program SKTB.
		11. Pemerintah daerah membentuk atau menunjuk suatu lembaga untuk mengevaluasi mutu Pendidikan dalam

		<p>penyelenggaraan program SKTB.</p> <p>12. Pemerintah daerah menyediakan dana untuk penyelenggaraan SKTB.</p>
6	Hak dan Kewajiban Peserta Didik	<p>1. Peserta didik mendapatkan pelayanan Pendidikan secara maksimal agar peserta didik dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran.</p> <p>2. Peserta didik menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar setiap siswa dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.</p> <p>3. Peserta didik berkewajiban mengikuti seluruh proses</p>

		<p>pembelajaran.</p> <p>4. Peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma Pendidikan</p>
7	Deteksi Dini	<p>1. Sekolah melakukan kegiatan diawal pembelajaran untuk mendapatkan data dan informasi tentang minat, bakat, kompetensi dan kretifitas setiap siswa terhadap setiap mata pelajaran</p>
8	Satuan Kredit Semester (SKS)	<p>1. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester.</p> <p>2. Sekolah melakukan kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.</p> <p>3. Sekolah melakukan kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi oleh peserta didik yang dirancang</p>

		<p>oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh pendidik.</p> <p>4. Sekolah melakukan kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya diatur oleh peserta didik.</p>
--	--	--

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada di lokasi penelitian. Selain dari itu, ada juga yang mengartikan bahwa penggunaan metode dokumentasi yaitu mencari informasi data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, notulen rapat, maupun data suatu agenda¹⁵. Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari observasi.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.

d. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya suatu instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. Data hasil validasi para ahli untuk instrumen dianalisis dengan mempertimbangkan masukan, komentar dan saran-saran dari validator.¹⁶

Menurut Rafiqah kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data kelayakan instrumen yaitu:

- 1) Melakukan rekapitulasi hasil penilaian para ahli ke dalam tabel yang meliputi aspek (A_i), kriteria (K_i), dan hasil penilaian validator.
- 2) Mencari rata-rata hasil penilaian para ahli untuk setiap kriteria dengan rumus:

$$\overline{K_i} = \frac{\sum_{j=1}^n V_{ij}}{n}$$

Keterangan:

$\overline{K_i}$ = rata-rata kriteria ke-i

V_{ij} = skor hasil penilaian terhadap kriteria ke-i

n = banyaknya penilai

- 3) Mencari rata-rata tiap aspek dengan rumus:

$$\overline{A_i} = \frac{\sum_{j=1}^n K_{ij}}{n}$$

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 144-145.

Keterangan:

\overline{A}_i = rata-rata aspek ke-i

K_{ij} = skor hasil penilaian terhadap aspek ke-i kriteria ke-j

n = banyaknya kriteria dalam aspek ke-i

4) Mencari rata-rata total dengan rumus:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{j=1}^n \overline{A}_i}{n}$$

Keterangan:

\overline{X} = rata-rata total

\overline{A}_i = rata-rata aspek ke-i

n = banyaknya aspek

5) Menentukan kategori validitas setiap kategori \overline{K}_i atau setiap rata-rata aspek \overline{A}_i atau rata-rata total \overline{X} dengan kategori validasi yang telah ditetapkan.

6) Kategori validitas yaitu sebagai berikut:

$3,5 \leq M \leq 4,0$ sangat valid

$2,5 \leq M < 3,5$ valid

$1,5 \leq M < 2,5$ cukup valid

$M < 1,5$ tidak valid

Keterangan:

M = \overline{K}_i untuk mencari validitas setiap kriteria

M = \overline{A}_i untuk mencari validitas setiap aspek

M = \overline{X} untuk mencari validitas keseluruhan aspek

Kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa instrumen memiliki derajat validitas yang memadai adalah nilai rata-rata validitas untuk keseluruhan aspek minimal berada dalam kategori cukup valid dan nilai validitas untuk setiap aspek minimal berada dalam kategori valid. Jika tidak demikian, maka perlu dilakukan revisi berdasarkan saran dari validator atau dengan melihat kembali aspek-aspek yang dinilai kurang. Selanjutnya dilakukan validasi ulang lalu dianalisis kembali. Demikian seterusnya sampai memenuhi nilai M minimal berada didalam kategori valid.¹⁷

e. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.¹⁸

Instrumen pada penelitian ini akan diuji tingkat reliabilitasnya menggunakan cara reliabilitas *internal*. Reliabilitas *internal* merupakan cara menguji tingkat reliabilitas instrumen dengan perhitungan dilakukan berdasarkan data dari instrumen tersebut saja¹⁹. Analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas oleh dua orang pengamat validator

¹⁷ Rafiqah, *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika Berbasis Konstruktivisme Setting Kooperatif*. Tesis (Makassar: UNM, 2013), h. 36-37.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 154.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 155.

(pada dua aspek yang sama) pada instrumen digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{percentage of agreement} = \left[1 - \frac{A-B}{A+B} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

A = hasil penilaian pengamat yang memberikan nilai lebih tinggi

B = hasil penilaian pengamat yang memberikan nilai lebih rendah

Instrumen dikatakan baik jika mempunyai indeks kesepahaman $\geq 0,75$ atau $\geq 75\%$.²⁰

3. Tahap pelaporan

Pada tahap ini peneliti menyusun laporan penelitian yang dilakukan dalam bentuk finalisasi penelitian dengan menuangkan hasil pengolahan, analisis, dan kesimpulan tersebut ke dalam bentuk tulisan yang disusun secara konsisten, sistematis, dan metodologis.

F. Teknik Analisis

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah dan rumus yang digunakan yaitu:

1. Tabulasi

Menurut Suharsimi Arikunto yang termasuk kedalam kegiatan tabulasi ini antara lain:

- a. Memberikan skor (*scoring*) terhadap item-item yang perlu diberi skor.

²⁰Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*(Jakarta: Kencana, 2011), h. 241.

- b. Memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi kode.
- c. Mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik analisis yang akan digunakan.
- d. Memberikan kode (*coding*) dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Dalam hal ini pengolah data memberikan kode pada semua variabel, kemudian mencoba menentukan tempatnya di dalam *coding sheet* (*coding form*), dalam kolom ke berapa baris ke berapa. Apabila akan dilanjutkan, sampai kepada petunjuk penempatan setiap variabel pada kartu kolom (*punc card*).²¹

2. Analisis Deskriptif

- 1) Mencari *mean score*:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n} \quad 22$$

- 2) Menghitung nilai standar deviasi (simpangan baku)

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n-1}} \quad 23$$

- 3) Menghitung nilai varians (kuadrat standar deviasi)

$$S = (Sd)^2 \quad 24$$

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 210-211.

²² Muhammad Arif Tiro, *Analisis Korelasi dan Regresi* (Makassar: State University of Makassar Press, 2008), h. 12.

²³ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 60.

²⁴ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* h. 273.

- 4) Menghitung persentase jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal melalui distribusi frekuensi dan persentase

$$P = \frac{f}{n} 100\%$$

Keterangan:

P = persentase

f = frekuensi data

n = jumlah sampel yang diolah²⁵



²⁵ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 59.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang terdiri atas uji validitas dan reliabilitas instrumen dan data dari angket respon guru dan lembar observasi yang dianalisis secara deskriptif.

A. Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengukur keterlaksanaan kebijakan program SKTB di SMAN pada Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu yaitu berupa angket/kuisisioner dimana indikator-indikator dalam angket/kuisisioner tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 10 tahun 2013. Sebelum instrumen penelitian ini digunakan, peneliti terlebih dahulu melakukan validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas isi/validitas pakar. Validasi instrumen dilakukan oleh dua orang pakar, yaitu:

Tabel 4.1

Nama-Nama Validator

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.	Ketua jurusan pendidikan fisika
2	Drs. M. Yusuf Hidayat, M.Pd.	Dosen jurusan pendidikan fisika

Aspek-aspek yang divalidasi pada angket/kuisi oner kedisiplinan guru fisika terdiri atas aspek petunjuk, bahasa dan kelayakan isi. Berdasarkan skor yang diberikan oleh dua validator untuk setiap aspek yang divalidasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Validasi Instrumen Angket

No.	Aspek yang divalidasi	Skor validator		Rata-rata	Keterangan
		1	2		
1	Petunjuk	4,00	4,00	4,00	Sangat Valid
2	Bahasa	3,00	4,00	3,50	Sangat Valid
3	Kelayakan isi	3,25	4,00	3,63	Sangat Valid
Rata-rata Total				3.71	Sangat Valid

Pada tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa rerata skor yang diperoleh untuk setiap aspek yang divalidasi sebesar 3,71. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 dikategorikan sangat valid. Selain itu, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji *percent of agreement* diperoleh nilai reliabilitas sebesar $R = 0,91$. Nilai R tersebut lebih besar dari 0,70 ($R > 0,70$), sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 layak untuk digunakan atau reliabel.

2. Analisis Deskriptif Respon Guru Terhadap Keterlaksanaan Kebijakan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013

Gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 diukur menggunakan instrumen berupa angket/kuisisioner untuk guru yang terdiri dari 40 item. Ke 40 item tersebut mengukur keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013. Analisis tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. SMAN 2 Gowa Kecamatan Bajeng

Berdasarkan hasil angket/kuisisioner untuk mengukur keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 pada SMAN 2 Gowa Kec. Bajeng maka diperoleh gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Distribusi Skor Respon Guru untuk SMAN 2 Gowa Kec. Bajeng

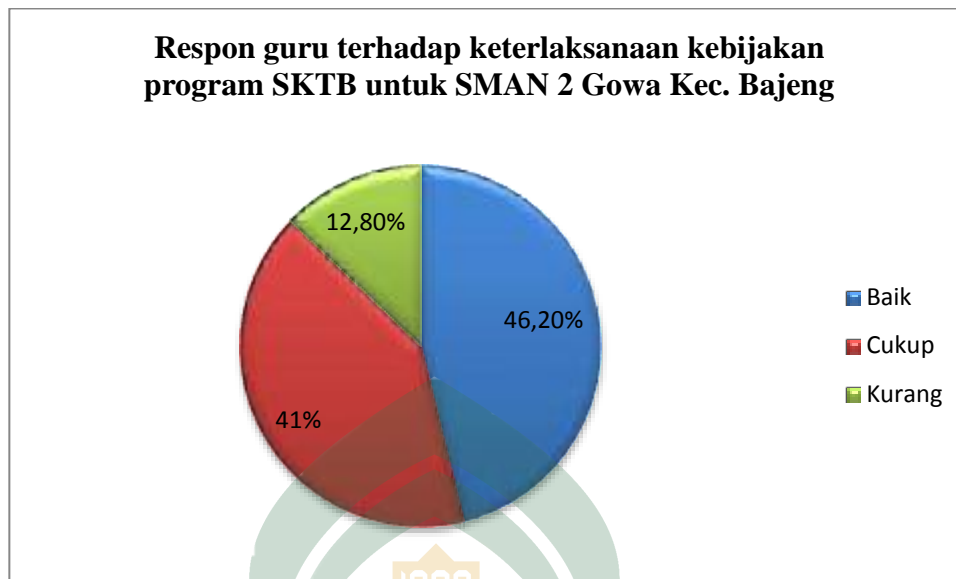
No.	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	$X \geq 130$	18	46.2 %	Baik
2	$120.3 \leq X < 130$	16	41 %	Cukup

3	$X < 120.3$	5	12.8 %	Kurang
Jumlah		39	100 %	

(Sumber: Saifuddin Azwar, 2003: 163)

Berdasarkan tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa respon guru terkait keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 pada SMAN 2 Gowa Kec. Bajeng dengan menggunakan instrumen berupa angket/kuisiонерdikategorikan tinggi dengan persentase 46.2%, dikategorikan sedang dengan persentase 41%, dan dikategorikan rendah dengan persentase 12,8% dari total 39 responden.

Apabila dianalisis lebih lanjut atas gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 pada SMAN 2 Gowa Kec. Bajengyang diukur menggunakan instrumen berupa angket/kuisiонер dapat disajikan menggunakan diagram seperti dibawah ini:



Gambar 4.1: Grafik Distribusi Skor Respon Guru untuk SMAN 2 Gowa Kec. Bajeng

b. SMAN 21 Gowa Kecamatan Pattalassang

Berdasarkan hasil angket/kuisisioner untuk mengukur keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 pada SMAN 21 Gowa Kec. Pattalassang maka diperoleh gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Distribusi Skor Respon Guru untuk SMAN 21 Gowa Kec. Pattalassang

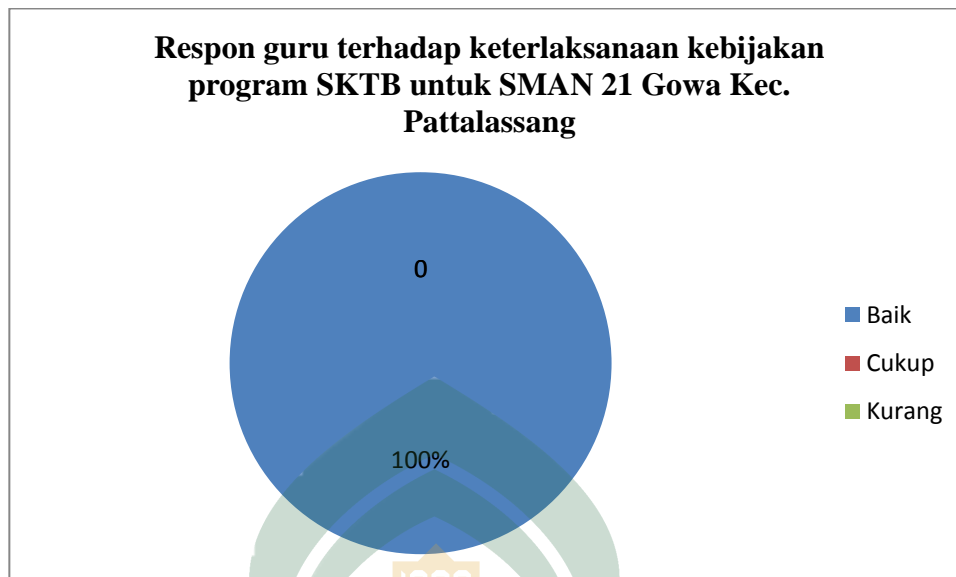
No.	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	$X \geq 130$	18	100	Baik
2	$120.3 \leq X < 130$	0	0	Cukup

3	$X < 120.3$	0	0	Kurang
Jumlah		18	100 %	

(Sumber: Saifuddin Azwar, 2003: 163)

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa respon guru terkait keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 pada SMAN 21 Gowa Kec. Pattalassang dengan menggunakan instrumen berupa angket/kuisi onerdikategorikan tinggi dengan persentase 100%, dikategorikan sedang dengan persentase 0%, dan dikategorikan rendah dengan persentase 0% dari total 18 responden.

Apabila dianalisis lebih lanjut atas gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 pada SMAN 21 Gowa Kec. Pattalassang yang diukur menggunakan instrumen berupa angket/kuisi oner dapat disajikan menggunakan diagram seperti dibawah ini:



Gambar4.2:Grafik Distribusi Guru untuk SMAN 21 Gowa Kec. Pattalassang

c. SMAN 8 Gowa Kecamatan Bontomarannu

Berdasarkan hasil angket/kuisisioner untuk keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 pada SMAN 8 Gowa Kec. Bontomarannu maka diperoleh gambaran kedisiplinan guru fisika untuk pulang sesuai ketentuan jam kerja disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5

Distribusi Skor Respon Guru SMAN 8 Gowa Kec. Bontomarannu

No.	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	$X \geq 130$	34	97.1	Baik
2	$120.3 \leq X < 130$	1	2.9	Cukup
3	$X < 120.3$	0	0	Kurang

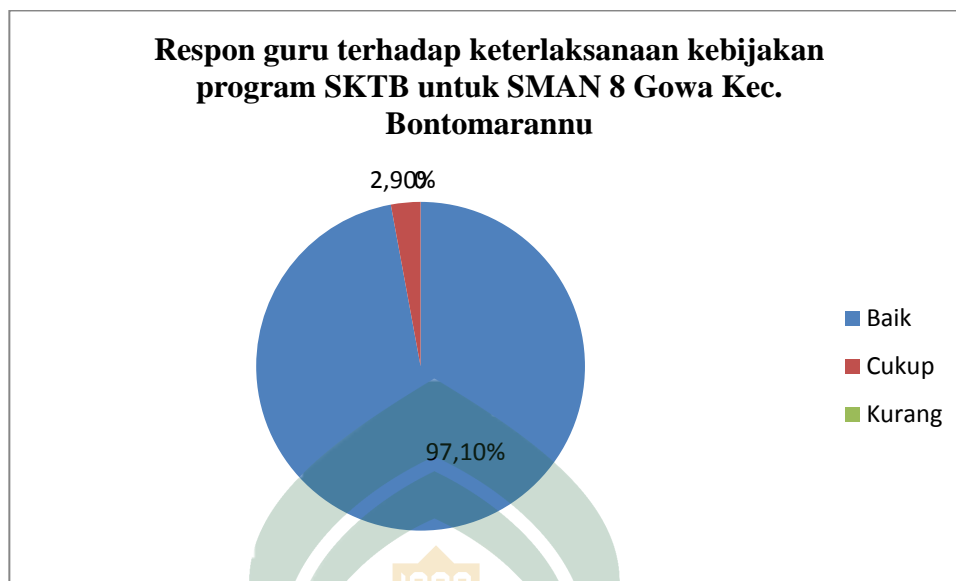
Jumlah	35	100 %	
---------------	----	-------	--

(Sumber: Saifuddin Azwar, 2003: 163)

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa respon guru terkait keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 pada SMAN 8 Gowa Kec. Bontomarannu dengan menggunakan instrumen berupa angket/kuisisioner dikategorikan tinggi dengan persentase 97,1%, dikategorikan sedang dengan persentase 2,9%, dan dikategorikan rendah dengan persentase 0% dari total 35 responden.

Apabila dianalisis lebih lanjut atas gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 pada SMAN 8 Gowa Kec. Bontomarannu yang diukur menggunakan instrumen berupa angket/kuisisioner dapat disajikan menggunakan diagram seperti dibawah ini:

STAF KEMAH SAMA NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



Gambar4.3:Grafik Distribusi Skor Respon Guru SMAN 8 Gowa Kec.

Bontomarannu

d. Keterlaksanaan Kebijakan Program SKTB secara Keseluruhan

Berdasarkan hasil angket/kuisioner keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 dari ketiga Kecamatan yaitu Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu maka diperoleh gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6

Distribusi Skor Respon Gurusecara Keseluruhan

INTERVAL	KECAMATAN						KATEGORI
	BAJENG		PATTALASSANG		BONTOMARANNU		
	f	%	F	%	f	%	

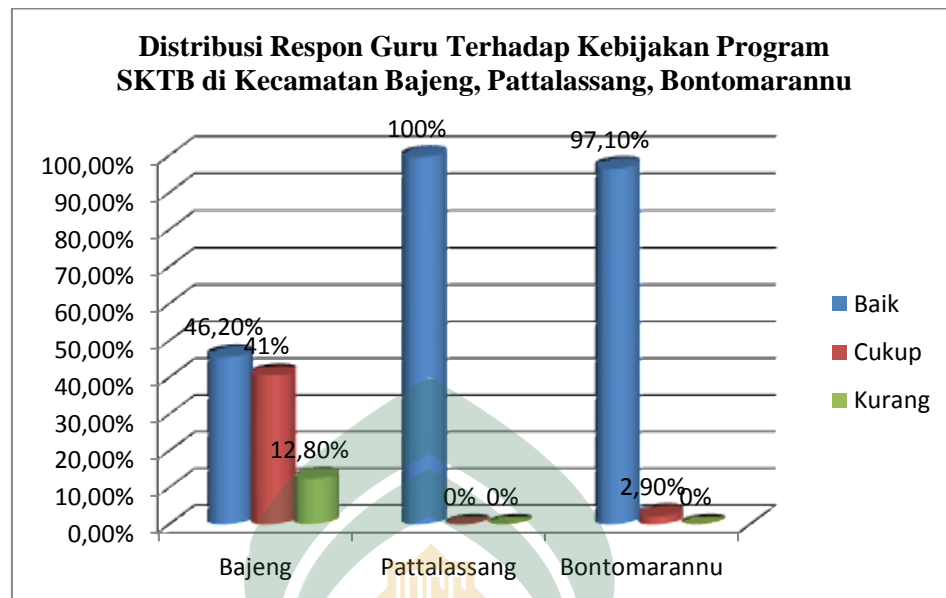
$X \geq 130$	18	46.2	18	100	34	97.1	Baik
$120.3 \leq X < 130$	16	41	0	0	1	2.9	Cukup
$X < 120.3$	5	12.8	0	0	0	0	Kurang
JUMLAH	39	100	18	100	35	100	

(Sumber: Saifuddin Azwar, 2003: 163)

Berdasarkan tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa respon guru terkait keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 di ketiga Kecamatan dengan menggunakan instrumen berupa angket/kuisi oner menunjukkan bahwa Kecamatan Pattalassang yang paling baik dalam keterlaksanaan kebijakan program SKTB dengan persentase sebesar 100%.

Apabila dianalisis lebih lanjut atas gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 pada ketiga Kecamatan yang diukur menggunakan instrumen berupa angket/kuisi oner dapat disajikan menggunakan diagram seperti dibawah ini:

M A K A S S A R



Gambar 4.4: Grafik Distribusi Skor Respon Guru Keseluruhan

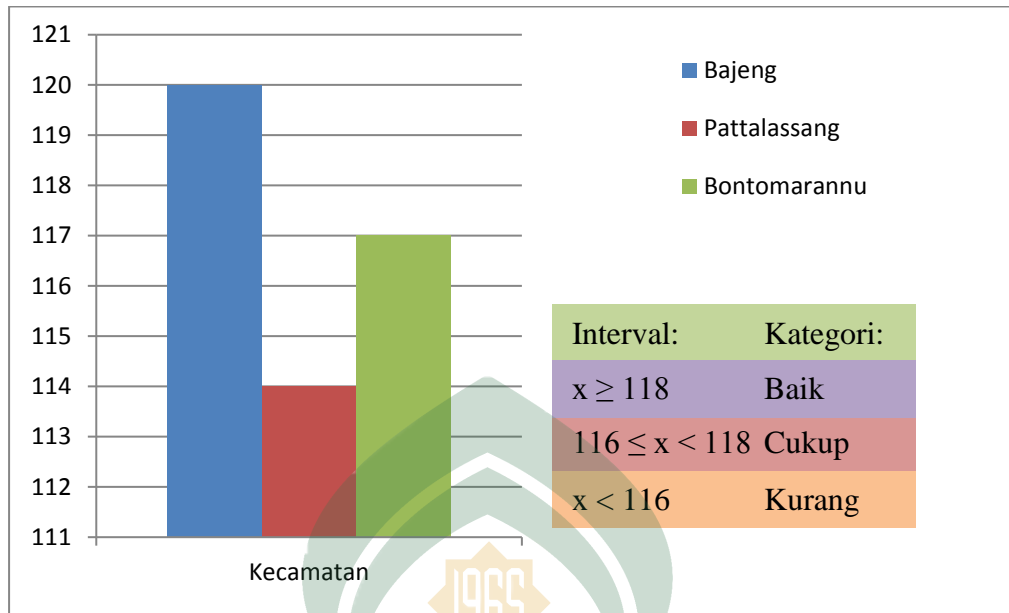
3. Analisis Deskriptif Observer Terhadap Keterlaksanaan Kebijakan Program SKTB Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013

Gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 diobservasi oleh observer. Dalam hal ini peneliti menggunakan lembar observasi yang terdiri dari 40 item pernyataan. Ke 40 item tersebut mengukur keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 yang memuat Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan maka diperoleh gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Perbandingan Skor Hasil Observasi

Kecamatan	Skor	Kategori
Bajeng	120	Baik
Pattalassang	114	Kurang
Bontomarannu	117	Cukup
Rata-Rata	117	Cukup

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil observasi terkait keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 di Kecamatan Bajeng dikategorikan paling baik dengan skor 120 sementara Kecamatan Pattalassang dan Bontomarannu masing-masing memiliki skor 114 dan 117. Apabila dianalisis lebih lanjut atas hasil observasi terkait gambaran keterlaksanaan kebijakan program SKTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2013 dapat disajikan menggunakan diagram seperti dibawah ini:



Gambar 4.5: Grafik skor hasil observasi

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan di SMAN berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen berupa angket/kuisisioner yang telah divalidasi oleh ahli dan dibagikan ke subjek penelitian untuk diisi dalam hal ini guru SMAN yang berada di Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu dengan total 92 orang. Selain itu, untuk menunjang data yang diperoleh dari angket/kuisisioner peneliti melakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi sebagai panduan.

Keterlaksanaan kebijakan program SKTB yang dimaksud disini yakni keterlaksanaan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 10 tahun

2013 yang mencakup tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu.

Dari instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang gambaran keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan di SMAN berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 maka diperoleh hasil analisis data untuk Kecamatan Bajeng mayoritas menyatakan bahwa keterlaksanaan program system kelas tuntas berkelanjutan di Kecamatan Bajeng berada dalam kategori baik dengan persentase sebesar 46,20%.

Untuk Kecamatan Pattalassang peneliti memperoleh data tentang gambaran keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan di SMAN berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 mayoritas menyatakan bahwa keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan di Kecamatan Pattalassang berada dalam kategori baik dengan persentase sebesar 100%.

Untuk Kecamatan Bontomarannu peneliti memperoleh data tentang gambaran keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan di SMAN berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 mayoritas menyatakan bahwa keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan di Kecamatan Bontomarannu berada dalam kategori baik dengan persentase sebesar 97,1%.

Berdasarkan hasil analisis gambaran keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan di SMAN berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pattalassang memiliki tingkat persentase keterlaksanaan tertinggi dari ketiga Kecamatan tersebut.

Sedangkan analisis dari observasi yang dilakukan peneliti pada Kecamatan Bajeng, Bontomarannu dan Pattalassang terkait keterlaksanaan kebijakan rogram system kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 10 tahun 2013 diperoleh hasil skor berturut-turut sebesar 120, 117, 114 dengan rata-rata skor 117.

Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa Kecamatan Bajeng berada pada kategori baik sedangkan Kecamatan Bontomarannu berada pada kategori cukup dan Kecamatan Pattalassang berada pada kategori kurang.

Dalam penelitian ini hasil dari angket dan lembar observasi berbeda karena beberapa faktor salah satunya responden merasa takut untuk mengisi lembar angket dengan jujur karena adanya tekanan dari pemerintah, responden berasumsi ketika mereka memberi jawaban dengan jujur dan diketahui oleh pemerintah maka akan ada mutasi atau pemindahan yang berdampak kepada mereka sehingga responden merasa takut untuk mengisi lembar angket dengan jujur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan data-data yang dihimpun, ditabulasikan dan diinterpretasikan maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hitungan distribusi frekuensi dari respon guru di Kecamatan Bajeng yang dijadikan subjek penelitian mayoritas menyatakan keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 berada dalam kategori baik dengan persentase 46.2%, Sedangkan dari respon guru di Kecamatan Pattalassang yang dijadikan subjek penelitian mayoritas menyatakan keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 berada dalam kategori baik dengan persentase 100% dan dari respon guru di Kecamatan Bontomarannu yang dijadikan subjek penelitian mayoritas menyatakan keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 berada dalam kategori baik dengan persentase 97.1%. Untuk hasil hitungan skor dari observasi yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 di Kecamatan Bajeng, Pattalassang dan Bontomarannu secara berturut-turut berada dalam kategori baik, rendah dan cukup dengan skor berturut-turut 120, 114 dan 117.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menggambarkan keterlaksanaan kebijakan program system kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 pada umumnya berada dalam kategori baik. Untuk itu penulis mengemukakan implikasi sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pemerintah daerah agar lebih memperhatikan keadaan sekolah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang berlaku terutama dalam hal kebijakan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).
2. Kepada pihak Sekolah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) agar lebih mengasosialisasikan program ini kepada masyarakat khususnya orang tua murid yang mempunyai peran penting dalam membimbing dan memotivasi anaknya untuk mengikuti program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- B Uno, Hamzah dan Nina Lamatenggo. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016
- Damopolii, M. *Program Pendidikan Gratis*. Makassar: Alauddin University Press. 2012
- Darmadi, Hamid, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, Bandung: Alfabeta, 2003
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Mulya S, Mulyani. *Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rafiqah. "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika Berbasis Konstruktivisme Setting Koopertif". *Tesis*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2013.
- Republik Indonesia. "Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan"
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional"
- Sa'ud, Udin Saefuddin dan Abin Syamsuddin Makmun. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014
- Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Siregar, Syofian. *Statistik Pematerik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Subana dkk. *Statistik Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Tiro, Muhammad Arif. *Analisis Korelasi dan Regresi*. Makassar: State University of Makassar Press, 2008.
- Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN I: ANALISIS DESKRIPTIF DATA PENELITIAN

1. ANALISIS DESKRIPTIF ANGKET RESPON GURU SMAN 2 GOWA

KECAMATAN BAJENG

Skor maksimum : 156

Skor minimum : 101

N : 39

1) Rentang Nilai

$$R = X_t - X_r$$

$$= 156 - 101$$

$$= 55$$

2) Jumlah Kelas Interval (K)

$$K = 1 + 3,3 \cdot \log 39$$

$$= 1 + 3,3(1,59)$$

$$= 1 + 5,247$$

$$= 6,2 \text{ dibulatkan } 6$$

3) Panjang Kelas Interval

$$P = \frac{R}{K}$$

$$= \frac{55}{6}$$

$$= 9,2 \text{ dibulatkan menjadi } 9$$

4) Membuat tabel distribusi frekuensi

Tabulasi Data Untuk Menghitung Frekuensi Variabel

Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
101-106	1	2.6
107-112	3	7.7
113-118	1	2.6
119-124	7	17.9
125-130	10	25.6
131-136	5	12.8
137-142	5	12.8
143-148	5	12.8
149-154	1	2.6
155-160	1	2.6
Jumlah	39	100

Berdasarkan tabel diatas, pada hasil respon guru di SMAN 2 Gowa frekuensi terbesar berada pada skor 125-130 yang terdiri dari 10 orang responden dengan persentase 25,6%.

5) Menghitung rata-rata (mean) variabel X

Tabulasi Data Untuk Menghitung Nilai Rata-Rata (Mean) Variabel

Interval	f_i	x_i	$f_i x_i$
101-106	1	103.5	103.5
107-112	3	109.5	328.5
113-118	1	115.5	115.5
119-124	7	121.5	850.5
125-130	10	127.5	1275

131-136	5	133.5	667.5
137-142	5	139.5	697.5
143-148	5	145.5	727.5
149-154	1	151.5	151.5
155-160	1	157.5	157.5
Σ	39	1305	5074.5

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} \\ &= \frac{5074.5}{39} \\ &= 130.12\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas, untuk menghitung nilai rata-rata pada respon guru SMAN 2 GOWA diperoleh skor rata-rata dari 39 informan yaitu 130.12

6) Standar Deviasi

Standar Deviasi Respon Informan

Interval	f_i	x_i	$f_i x_i$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i (x_i - \bar{x})^2$
101-106	1	103.5	103.5	-26.6	707.56	707.56
107-112	3	109.5	328.5	-20.6	424.36	1273.08
113-118	1	115.5	115.5	-14.6	213.16	213.16
119-124	7	121.5	850.5	-8.6	73.96	517.72
125-130	10	127.5	1275	-2.6	6.76	67.6
131-136	5	133.5	667.5	3.4	11.56	57.8
137-142	5	139.5	697.5	9.4	88.36	441.8

143-148	5	145.5	727.5	15.4	237.16	1185.8
149-154	1	151.5	151.5	21.4	457.96	457.96
155-160	1	157.5	157.5	27.4	750.76	750.76
Σ	39	1305	5074.5	4	2971.6	5673.24

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{5673.24}{39-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{5673.24}{38}}$$

$$= \sqrt{149.2957895}$$

$$= 12.22$$

7) Mengitung Varians

$$s^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}$$

$$= \frac{5673.24}{39-1}$$

$$= \frac{5673.24}{38}$$

$$= 149.3$$

8) Koefisien Variasi

$$KV = \frac{\text{Standar deviasi}}{\text{rata - rata}} \times 100\%$$

$$= \frac{12.22}{130.12} \times 100\%$$

$$= 0,09 \%$$

9) Analisis Deskriptif Angket Respon guru SMAN 2 GOWA dengan SPSS

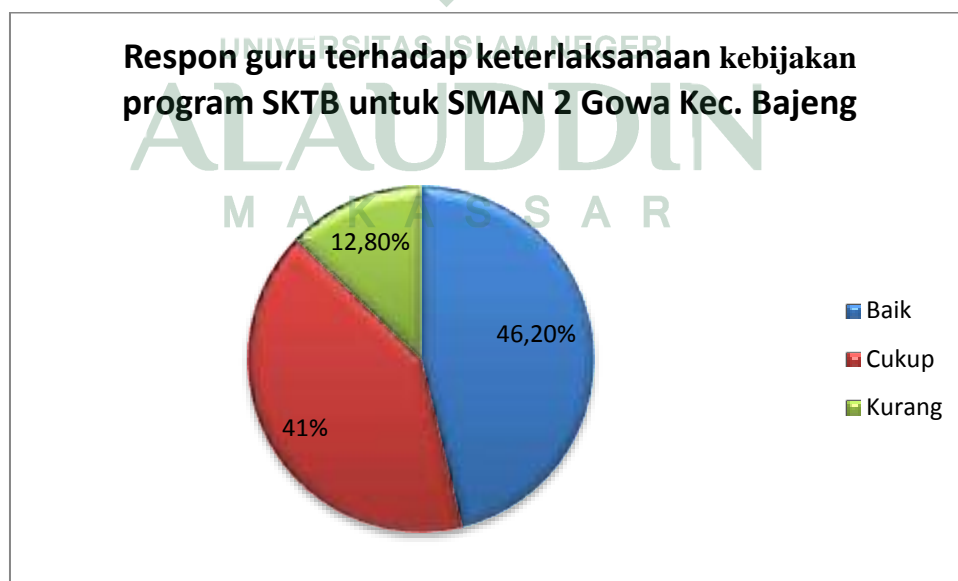
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
SMAN_2_GOWA	39	101.00	156.00	129.7436	12.34316	152.354
Valid N (listwise)	39					

10) Kategorisasi Angket Respon Guru SMAN 2 Gowa Kecamatan Bajeng

No.	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	$X \geq 130$	18	46.2 %	BAIK
2	$120.3 \leq X < 130$	16	41 %	CUKUP
3	$X < 120.3$	5	12.8 %	KURANG
Jumlah		39	100 %	

11) Grafik Kategorisasi Respon Guru SMAN 2 Gowa Kecamatan Bajeng



2. ANALISIS DESKRIPTIF ANGKET RESPON GURU SMAN 21 GOWA KECAMATAN PATTALASSANG

Skor maksimum : 159

Skor minimum : 139

N : 18

1) Rentang Nilai

$$R = X_t - X_r$$

$$= 159 - 139$$

$$= 20$$

2) Jumlah Kelas Interval (K)

$$K = 1 + 3,3 \cdot \log 18$$

$$= 1 + 3,3(1,26)$$

$$= 1 + 4,16$$

$$= 5,2 \text{ dibulatkan } 5$$

3) Panjang Kelas Interval

$$P = \frac{R}{K}$$

$$= \frac{20}{5}$$

$$= 4$$

4) Membuat tabel distribusi frekuensi

Tabulasi Data Untuk Menghitung Frekuensi Variabel

Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
139-143	2	11

144-148	1	5.6
149-153	6	33.3
154-158	8	44.5
159-163	1	5.6
Jumlah	18	100

Berdasarkan tabel diatas, pada hasil respon guru SMAN 21 GOWA diperoleh respon dengan distribusi frekuensi terbesar berada pada skor 154-158 yang terdiri dari 8 orang informan dengan persentase 44.5%.

5) Menghitung rata-rata (mean) variabel X

Tabulasi Data Untuk Menghitung Nilai Rata-Rata (Mean) Variabel

Interval	f_i	x_i	$f_i x_i$
139-143	2	141	282
144-148	1	146	146
149-153	6	151	906
154-158	8	156	1248
159-163	1	161	161
Σ	18	755	2743

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$= \frac{2743}{18}$$

$$= 152.4$$

Berdasarkan tabel di atas, untuk menghitung nilai rata-rata pada respon guru SMAN 21 GOWA diperoleh skor rata-rata dari 18 informan yaitu 152.3

6) Standar Deviasi

Standar Deviasi Respon Informan

Interval	f_i	x_i	$f_i x_i$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i(x_i - \bar{x})^2$
139-143	2	141	282	-11.4	129.96	259.92
144-148	1	146	146	-6.4	40.96	40.96
149-153	6	151	906	-1.4	1.96	11.76
154-158	8	156	1248	3.6	12.96	103.68
159-163	1	161	161	8.6	73.96	73.96
Σ	18	755	2743	-7	259.8	490.28

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{490.28}{18-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{490.28}{17}}$$

$$= \sqrt{28.84}$$

$$= 5.34$$

7) Mengitung Varians

$$s^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}$$

$$= \frac{490.28}{18-1}$$

$$= \frac{490.28}{17}$$

$$= 28.84$$

8) Koefisien Variasi

$$KV = \frac{\text{Standar deviasi}}{\text{rata - rata}} \times 100\%$$

$$= \frac{5.34}{152.4} \times 100\%$$

$$= 3.5 \%$$

9) Analisis Deskriptif Angket Respon Guru SMAN 21 Gowa

Descriptive Statistics

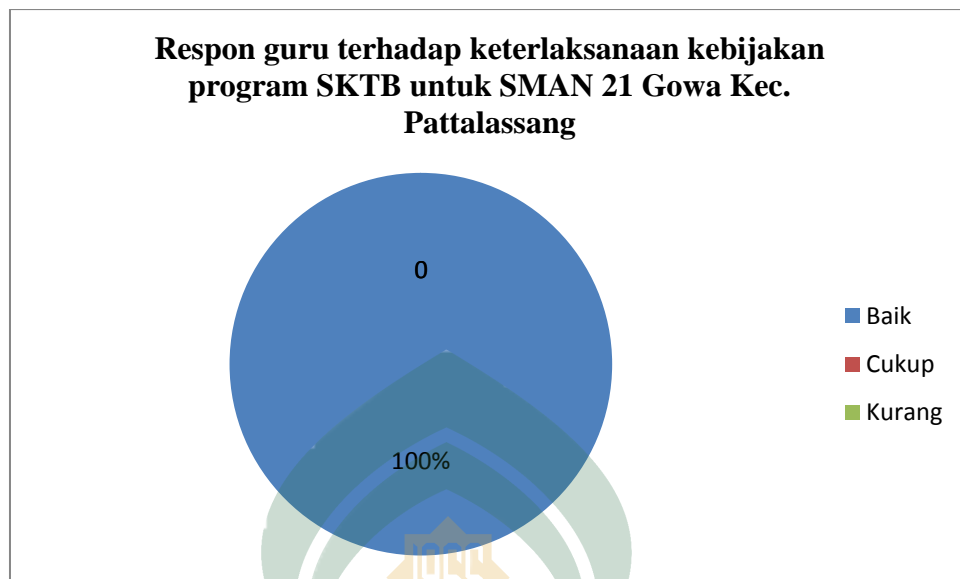
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
SMAN_21_GOWA	18	139.00	159.00	152.3333	5.33578	28.471
Valid N (listwise)	18					

10) Kategorisasi Angket Respon Guru SMAN 21 Gowa Kecamatan

Pattalassang

No.	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	$X \geq 130$	18	100	BAIK
2	$120.3 \leq X < 130$	0	0	CUKUP
3	$X < 120.3$	0	0	KURANG
Jumlah		18	100	

11) Grafik Kategorisasi Respon Guru SMAN 21Gowa Kecamatan Pattalassang



3. ANALISIS DESKRIPTIF ANGKET RESPON GURU SMAN 8 GOWA
KECAMATAN BONTOMARANNU

Skor maksimum : 155

Skor minimum : 122

N : 35

1) Rentang Nilai

$$R = X_i - X_r$$

$$= 155 - 122$$

$$= 33$$

2) Jumlah Kelas Interval (K)

$$K = 1 + 3,3 \cdot \log 35$$

$$= 1 + 3,3(1,54)$$

$$= 1 + 5,08$$

$$= 6,08 \text{ dibulatkan } 6$$

3) Panjang Kelas Interval

$$P = \frac{R}{K}$$

$$= \frac{33}{6}$$

= 5.5 dibulatkan menjadi 6

4) Membuat tabel distribusi frekuensi

Tabulasi Data Untuk Menghitung Frekuensi Variabel

Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
122-127	1	2.85
128-133	1	2.85
134-139	2	5.73
140-145	6	17.14
146-151	11	31.43
152-157	14	40
Jumlah	35	100

Berdasarkan tabel diatas, pada hasil respon guru SMAN 8 GOWA diperoleh respon dengan distribusi frekuensi terbesar berada pada skor 152-157 yang terdiri dari 14 orang informan dengan persentase 40%.

5) Menghitung rata-rata (mean) variabel X

Tabulasi Data Untuk Menghitung Nilai Rata-Rata (Mean) Variabel

Interval	f_i	x_i	$f_i x_i$
122-127	1	124.5	124.5

128-133	1	130.5	130.5
134-139	2	136.5	273
140-145	6	142.5	855
146-151	11	148.5	1633.5
152-157	14	154.5	2163
Σ	35	837	5179.5

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} \\ &= \frac{5179.5}{35} \\ &= 148\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas, untuk menghitung nilai rata-rata pada respon guru SMAN 8 GOWA diperoleh skor rata-rata dari 35 informan yaitu 148

6) Standar Deviasi

Standar Deviasi Respon Informan

Interval	f_i	x_i	$f_i x_i$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i (x_i - \bar{x})^2$
122-127	1	124.5	124.5	-23.5	552.25	552.25
128-133	1	130.5	130.5	-17.5	306.25	306.25
134-139	2	136.5	273	-11.5	132.25	264.5
140-145	6	142.5	855	-5.5	30.25	181.5
146-151	11	148.5	1633.5	0.5	0.25	2.75
152-157	14	154.5	2163	6.5	42.25	591.5
Σ	35	837	5179.5	-51	1063.5	1898.75

$$\begin{aligned}
 S_D &= \sqrt{\frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{1898.75}{35-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{1898.75}{34}} \\
 &= \sqrt{55.85} \\
 &= 7.47
 \end{aligned}$$

7) Mengitung Varians

$$\begin{aligned}
 s^2 &= \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{(n-1)} \\
 &= \frac{1898.75}{35-1} \\
 &= \frac{1898.75}{34} \\
 &= 55.85
 \end{aligned}$$

8) Koefisien Variasi

$$\begin{aligned}
 KV &= \frac{\text{Standar deviasi}}{\text{rata-rata}} \times 100\% \\
 &= \frac{7.47}{148} \times 100\% \\
 &= 5,04 \%
 \end{aligned}$$

9) Analisis Deskriptif Angket Respon Guru SMAN 8 GOWA dengan SPSS

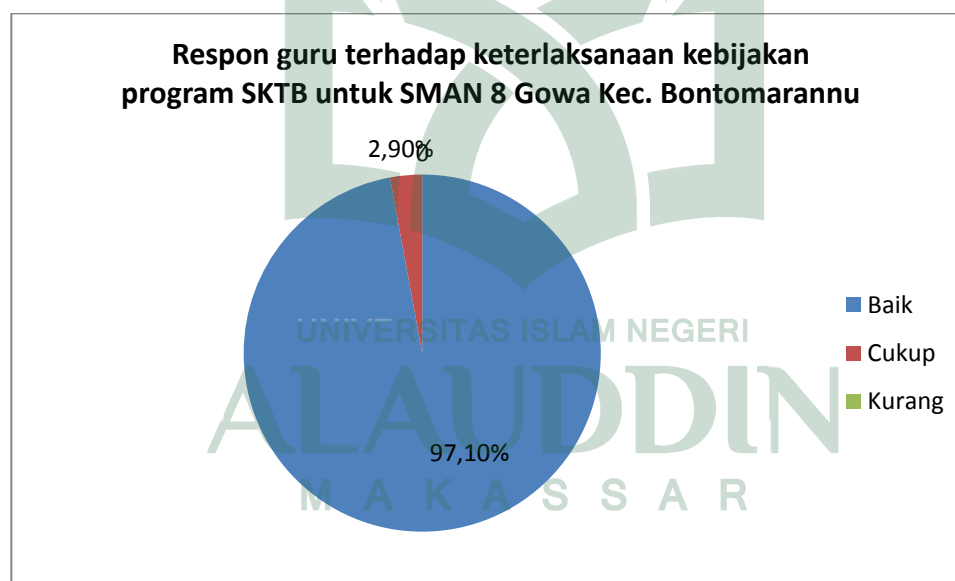
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
SMAN_8_GOWA	35	122.00	155.00	147.4857	7.28161	53.022
Valid N (listwise)	35					

10) Kategorisasi Angket Respon Guru SMAN 8 Gowa Kecamatan Bontomarannu

No.	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	$X \geq 130$	34	97.1	BAIK
2	$120.3 \leq X < 130$	1	2.9	CUKUP
3	$X < 120.3$	0	0	KURANG
Jumlah		35	100	

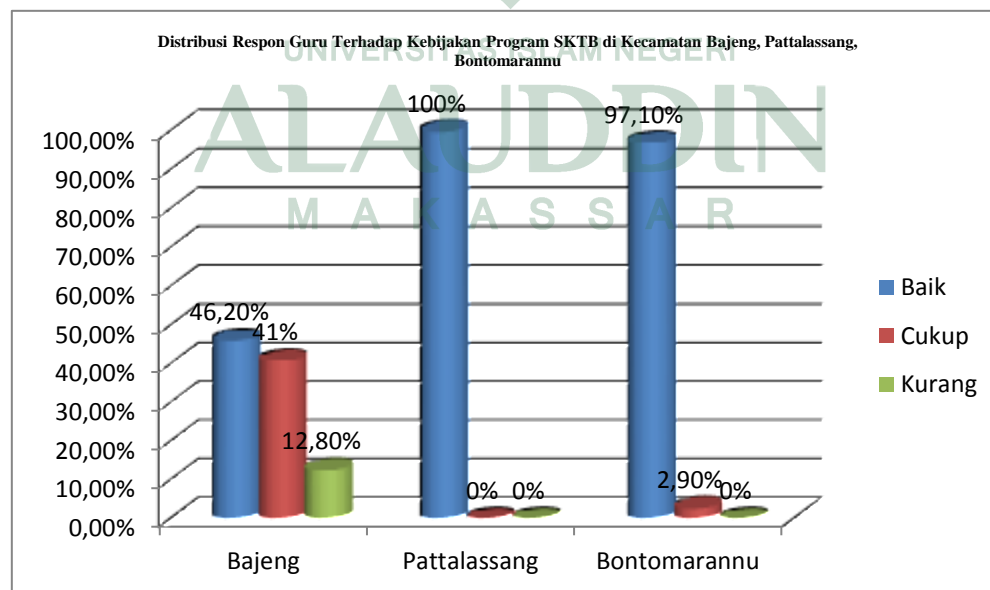
11) Grafik Kategorisasi Respon Guru SMAN 8 Gowa Kecamatan Bontomarannu



4. KATEGORISASI KETERLAKSANAAN SKTB DI KECAMATAN BAJENG, PATTALASSANG DAN BONTOMARANNU

INTERVAL	KECAMATAN						KATEGORI
	BAJENG		PATTALASSANG		BONTOMARANNU		
	f	%	F	%	f	%	
$X \geq 130$	18	46.2	18	100	34	97.1	BAIK
$120.3 \leq X < 130$	16	41	0	0	1	2.9	CUKUP
$X < 120.3$	5	12.8	0	0	0	0	KURANG
JUMLAH	39	100	18	100	35	100	

5. DIAGRAM KETERLAKSANAAN SKTB DI KECAMATAN BAJENG, PATTALASSANG DAN BONTOMARANNU



LAMPIRAN III : DOKUMENTASI

